



**RILIS**

**KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023 – 2024  
KE PROVINSI JAWA TIMUR  
TANGGAL 7 – 11 FEBRUARI 2024**

---

Untuk melaksanakan tugas pengawasan legislatif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Timur pada periode persidangan III Tahun Sidang 2023-2024. Tujuan dari kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah untuk memperoleh informasi, penjelasan, dan keterangan terkait beberapa hal, antara lain persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di daerah tersebut dalam melaksanakan tahapan pemilu yang sedang berlangsung, utamanya terkait dengan tahapan kampanye, Validasi Daftar Pemilih Tetap, pengamanan dan pendistribusian logistik hingga ke TPS, serta pengawasan tahapan pemilu. Selain itu, komisi II DPR RI juga ingin mengevaluasi dan memahami secara lengkap pelaksanaan program-program prioritas pertanahan dan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pertanahan.

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dipimpin oleh Anggota DPR RI yang terhormat, Bapak Riyanta, SH, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kegiatan ini berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc, beserta stafnya. Turut hadir juga perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, dalam rapat tersebut, juga hadir pejabat dari Kementerian/Lembaga yang bermitra dengan Komisi II DPR RI, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI kembali menegaskan tentang pentingnya mengawal netralitas dalam penyelenggaraan pemilu agar pemilu berjalan adil, aman dan transparan. Oleh karena itu, komisi II DPR RI meminta kepada penyelenggara pemilu, ASN, POLRI dan TNI untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Tim Kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja, kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah Provinsi, KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI dalam mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Sementara dalam isu pertahanan, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang berkaitan dengan Reforma Agraria terkait program PTSL yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Hal ini penting menjadi perhatian mengingat sertipikat sangat penting sebagai bukti kepemilikan tanah bagi masyarakat sehingga dengan sertipikat masyarakat tidak perlu takut lagi akan adanya sengketa ataupun konflik.

Beberapa catatan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Penyelenggara Pemilu, dan BPN Provinsi Jawa Timur dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI, antara lain adalah:

#### **A. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024**

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang sudah mencapai 97,5% dan akan diselesaikan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam proses perekaman, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan sistem jemput bola ke wilayah – wilayah terpencil, terluar/terdepan, dan tertinggal, selain itu juga melakukan pengawasan dan pendampingan layanan administrasi kependudukan. Permasalahan yang ditemukan di lapangan, masih banyak daerah – daerah utamanya wilayah 3T yang belum tersedia jaringan internet, mengingat untuk pengelolaan data kependudukan sudah menggunakan 1 (satu) data. Bagi warga negara yang kelahirannya bertetapan pada tgl 14 Februari dapat langsung memiliki KTP-EI di TPS sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memberikan dukungan fasilitas kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, seperti kantor, bantuan administrasi, pendistribusian logistik dan fasilitas lainnya guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Pemprov Jatim juga turut melakukan sosialisasi pemilu 2024 kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pemilu serentak. Untuk mengantisipasi kerawanan akan muncul konflik

pemilu, Pemrov Jatim sudah melakukan koordinasi dan sinergitas dengan TNI dan POLRI.

3. Untuk menjaga netralitas ASN, Pemrov Jatim sudah mengeluarkan Perda terkait dengan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu sejak tahun 2022, termasuk netralitas PTT (Pegawai Tidak tetap atau dengan perjanjian kerja). Untuk menjamin hal tersebut, Pemrov membuat kanal pengaduan bagi ASN yang melanggar kode etik (tidak netral).
4. KPU Provinsi Jawa Timur sudah siap melaksanakan Pemilu Tgl. 14 Februari 2024, logistik pemilu sudah siap 100% dan siap di distribusikan ke TPS dan dipastikan semua sudah terdistribusi sebelum pemilu. Permasalahan yang ada saat ini, ruang/gudang penyimpanan logistik pemilu terbatas sehingga diberikan kelonggaran logistik dengan mendistribusikan logistik pemilu ke daerah – daerah.
5. Bawaslu menemukan akan muncul kerawanan pada saat pemungutan dan perhitungan suara, dimana pemilih yang berstatus Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Bagaimana ketersediaan kertas suara di TPS. Hal ini harus diantisipasi agar tidak terjadi keriuhan di TPS. Hal ini penting juga diatur secara jelas dalam peraturan perundang – undangan.
6. Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, komisi II DPR RI meminta penyelenggara pemilu dapat dimasukkan dalam program asuransi.

## **B. Evaluasi program-program prioritas pertanahan dan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pertanahan.**

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja BPN Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2023, khususnya PTSL yang sudah mencapai 99,90% di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kab. Blitar, Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Malang, Kab. Madiun dan Kota Batu.
2. Dalam redistribusi lahan ditemukan beberapa kendala di lapangan diantaranya yaitu sebagian masyarakat masih kurang memahami redistribusi tanah sehingga kurang aktif, selain itu masyarakat dan aparat desa kurang terbuka terhadap permasalahan pertanahan yang ada di masyarakat. Menanggapi permasalahan ini, Komisi II DPR RI meminta agar sosialisasi program PTSL lebih dimassifkan lagi dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar masyarakat memahami pentingnya pendaftaran tanah karena ini merupakan program untuk kemakmuran rakyat.

Dalam penutup rapat, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI meminta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024 dan bersama-sama menjaga agar pemilihan tersebut berlangsung dengan aman dan damai. Pemilu tahun 2024 dianggap sebagai momen penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia dan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai kemajuan yang lebih baik.

Jawa Timur, 11 Februari 2024,  
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur.